

**PENERAPAN MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA DALAM  
DISTRIBUSI BAGI PENERIMA BANTUAN SOSIAL  
MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR**

Nabila R. Eragandhi

NPP. 29.0968

*Asdaf Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur*

*Program Studi Kebijakan Publik*

Email: nabila.rohada@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the problem that the registered beneficiaries are not in accordance with the actual situation in the field. And there are data that are not on target in the distribution of one of the social assistances from the government. **Purpose:** The purpose of this study is to describe the application of data verification and validation mechanisms in the distribution of Covid-19 social assistance in Wlingi District, Blitar Regency. **Method:** This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. and analysis of policy implementation according to Edward III's Theory. Data collection techniques were carried out by interview (4 informants), observation and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that there are still many problems related to duplicate data that cause inaccurate data and less than optimal distribution. The implementation of the verification and validation mechanism for the Covid-19 social assistance data in Wlingi District has not yet fully run optimally, because there are still obstacles related to resources, communication, disposition and bureaucratic structure. So that there is still data on Beneficiary Families (KPM) that is not in accordance with the actual situation in the field. **Conclusion:** In order to improve the application of the verification and validation mechanism for the Covid-19 social assistance data in Wlingi District, it is recommended that there is an increase in human resource capacity and communication between stakeholders so that implementation verification and validation of data running optimally.

**Keywords:** Social Assistance, Covid-19, Implementation, Verification, Validation

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan penerima manfaat yang terdaftar tidak sesuai dengan keadaan di lapangan sebenarnya. dan terdapat data yang tidak tepat sasaran dalam distribusi salah satu bantuan sosial dari pemerintah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan mekanisme verifikasi dan validasi data dalam pendistribusian bantuan sosial Covid-19 di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. dan analisis terhadap implementasi kebijakan menurut Teori Edward III. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (4 informan), observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh

penulis dalam penelitian ini yaitu masih banyak permasalahan terkait data ganda yang menyebabkan data tidak akurat dan pendistribusian kurang maksimal. Penerapan mekanisme verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* di Kecamatan Wlingi belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal, dikarenakan masih terdapat kendala yang berkaitan dengan sumberdaya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Sehingga masih terdapat data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. **Kesimpulan:** Guna meningkatkan Penerapan mekanisme verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* di Kecamatan Wlingi, disarankan perlu adanya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan komunikasi antar *stakeholder* sehingga pelaksanaan verifikasi dan validasi data berjalan secara maksimal.

**Kata kunci:** Bantuan Sosial, *Covid-19*, Penerapan, Verifikasi, Validasi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial dan subsidi untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat kurang mampu. Berbagai bantuan sosial maupun subsidi diberikan secara langsung kepada individu, keluarga, kelompok dari masyarakat kurang mampu melalui berbagai kementerian/lembaga pelaksana.

Setelah wabah *Covid-19* dinyatakan sebagai bencana nasional, pemerintah menetapkan kebijakan pencegahan penyebaran virus *Covid-19*, salah satunya yaitu pembatasan aktivitas masyarakat. Hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kelangsungan hidup masyarakat, seperti aktivitas ekonomi terganggu, pekerjaan harian tidak bisa dilakukan serta banyaknya gelombang pemutusan hak kerja (PHK) oleh perusahaan yang tidak bisa lagi menanggung beban akibat dari penurunan penghasilan di situasi pandemi.

Guna mengurangi dampak negatif pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian nasional, pemerintah menerapkan beberapa program penguatan sosial dan stimulus ekonomi dengan meningkatkan dan memperluas jaring pengaman sosial *Covid-19*. Program tersebut diantaranya yaitu pertama bantuan sosial sembako, merupakan bantuan non tunai bagi 20 juta keluarga penerima manfaat dimana penerima akan menerima bantuan sebesar Rp 200.000 perbulan. Kedua bantuan sosial tunai, penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000/KK setiap tiga bulannya. Ketiga pembebasan biaya listrik, bagi warga yang memiliki kapasitas listrik 450 kV akan dibebaskan biaya listrik dan pengguna listrik berkapasitas 900 VA mendapat potongan biaya 50% (durasi bantuan April-Juni 2020). Keempat Kartu Pra-kerja (kuota 5,6 juta orang), bagi warga negara yang berusia 18 tahun tidak sedang menempuh program pendidikan dan korban Pemutusan Hak Kerja (PHK) terdampak *Covid-19* mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1.000.000/pelatihan dan insentif sebesar Rp 600.000/bulan selama 4 bulan setelah selesai pelatihan. Kelima Program Keluarga Harapan (PKH), program ini untuk keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin namun saat ini pemerintah menambah jumlah peserta PKH bagi masyarakat terdampak *Covid-19* serta bantuan-bantuan lainnya. Berdasarkan program bantuan sosial yang telah disebutkan diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak sehingga perkenomian mereka dapat bangkit dari pandemi *Covid-19* ini.

### 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penerapan mekanisme verifikasi dan validasi data dalam distribusi bagi penerima bantuan sosial masa pandemi di Kecamatan Wlingi Kabupaten

Blitar yaitu permasalahan data. Masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan hak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya seperti tindakan maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar dan lain sebagainya. Walaupun petugas yang melaksanakan proses pendataan baik itu TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang ada, camat, kepala desa hingga tingkat RT dan RW sudah berupaya sebaik mungkin untuk mendata warganya, akan tetapi masih banyak ditemukan permasalahan seperti data ganda, warga mampu, warga meninggal, warga pindah, warga tidak ditemukan dan sebagainya, menyebabkan data tidak akurat dan pendistribusian kurang maksimal. Padahal dalam distribusi bantuan sosial *Covid-19* di Kecamatan Wlingi sudah diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban, Serta Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Blitar masih terdapat data yang tidak tepat sasaran dalam distribusi salah satu bantuan sosial dari pemerintah.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu diantaranya Penelitian Anwar Hakim Darajat dan Septa Ekasari berjudul Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar). (Darajat & Ekasari, 2021), menemukan bahwa efektivitas dan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik namun dalam penerapannya masih terdapat kendala sehingga menghambat pendistribusian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak *Covid-19*. Penelitian Maulana menemukan bahwa proses yang terjadi dalam implementasi kebijakan verifikasi dan validasi data PBI-JKN di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yang belum berjalan dengan maksimal dan belum cukup berhasil dikarenakan oleh beberapa faktor penghambat sehingga menyebabkan program pendataan tidak akurat, ketersediaan sumber daya manusia masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan program pendataan yang menyebabkan data tidak akurat dan penyalahgunaan jabatan kerap kali terjadi sehingga masyarakat yang seharusnya membutuhkan terabaikan. (Maulana, 2020). Penelitian Gumabo menemukan bahwa peran pendamping dalam verifikasi dan pemutakhiran data Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro yang belum maksimal, akibatnya banyak masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). (Gumabo, 2020). Penelitian Fatkhul Khiriyah, dkk menemukan bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Sosial dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro masih terdapat kendala yang dialami yaitu kurang akuratnya data penerima bantuan sosial, bantuan sosial tidak tepat sasaran serta munculnya konflik kecemburuan sosial di tengah masyarakat akibat dari tidak meratanya pendistribusian bantuan sosial. Penelitian Maun menemukan bahwa pendistribusian Bantuan Langsung Tunai di Desa Talaitad sudah berjalan mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku serta penerima bantuan tepat sasaran. Hal ini didasari oleh pernyataan masyarakat di lapangan yang merasakan langsung dampak dari BLT. (Maun, 2020).

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Penerapan Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data

dalam Distribusi Bagi Penerima Bantuan Sosial Masa Pandemi *Covid-19* masih jarang dilakukan, Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Edward III (1980) yang menyatakan bahwa implementasi dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan mekanisme verifikasi dan validasi data dalam pendistribusian bantuan sosial *Covid-19* di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan agar dapat memahami suatu peristiwa yang sedang terjadi dan berkaitan langsung dengan subyek penelitian dengan menggunakan deskripsi dalam suatu konteks khusus dengan menggunakan berbagai metode alamiah. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 4 orang informan yang terdiri dari Camat Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, Kasi Kesejahteraan Sosial, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)/Tim Pencacah Data, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Covid-19. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi kebijakan yang digagas oleh Edward III (1980) yang menyatakan bahwa implementasi dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis penerapan mekanisme verifikasi dan validasi data dalam distribusi bagi penerima bantuan sosial di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar menggunakan pendapat dari Edward III yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1. Sumberdaya**

#### **- Personil**

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan diperlukan personil atau staf yang berkompeten dan kapabel dalam bidangnya sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil observasi peneliti, tiap personil yang ditugaskan dalam penerapan verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* cukup baik dan berkompeten dibidangnya masing-masing. Rata-rata pendidikan yang dimiliki oleh perangkat Kecamatan Wlingi minimal adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Dimensi sumberdaya indikator personil sudah cukup terpenuhi walaupun belum maksimal dikarenakan masih terdapat kendala. Dimana operator desa/kelurahan yang ditunjuk merasa kurang adanya bimbingan teknis secara intens terkait verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* di Kecamatan Wlingi. Ditambah lagi jumlah personil lapangan yang sangat terbatas dimana satu desa/kelurahan hanya terdapat satu operator lapangan, namun terlepas dari kendala tersebut informan yang telah peneliti wawancara menyampaikan bahwa kinerja petugas terkait verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* di Kecamatan Wlingi

meningkat dikarenakan tuntutan dari atasan mengenai *deadline* data yang harus terpenuhi sesuai kuota yang telah ditentukan.

#### **- Informasi**

Terkait cara pelaksanaan kebijakan, bahwa penerapan mekanisme verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* di Kecamatan Wlingi sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Dimana data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kemudian data tersebut akan diverifikasi dan divalidasi oleh perangkat desa/kelurahan selanjutnya data tersebut disinkronisasikan dengan data Disdukcapil dan Kominfo serta informasi terkait cara pelaksanaan verifikasi dan validasi data diketahui dengan baik oleh pelaksana kebijakan yang ada di Kecamatan Wlingi. Meskipun dalam penerapannya belum sesuai dengan target yang diharapkan, dimana masih terdapat data yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.

Mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap hukum yang telah ditetapkan menurut pengamatan peneliti selama melaksanakan tugas terkait verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* berjalan sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat dilihat saat kegiatan Buka Rekening *E-Warung* di Aula Kecamatan Wlingi, petugas terkait datang sebelum kegiatan dilakukan untuk melakukan *briefing* terlebih dahulu. Sehingga kegiatan dimulai, masyarakat dapat segera dilayani sesuai dengan prosedur. Selain itu pada kegiatan pembagian BPNT bagi KPM di salah satu agen di Kecamatan Wlingi, baik perangkat kecamatan maupun petugas lapangan siap melayani masyarakat dibagiannya masing-masing. Berdasarkan data, observasi dan hasil wawancara diatas bahwa dalam dimensi sumberdaya indikator informasi belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih kurangnya informasi terkait penerapan mekanisme verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* di Kecamatan Wlingi sehingga menimbulkan data yang kurang valid.

#### **- Legitimasi**

Legitimasi merupakan otoritas atau wewenang yang diberikan kepada pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penerapan mekanisme verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* di Kecamatan Wlingi para pelaksana memiliki otoritas dibidangnya masing-masing. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu informan yaitu proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara bertahap dari lingkup pemerintah paling kecil yaitu RT dan RW hingga pusat, dimana masing-masing perangkat sudah diberikan wewenang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga hasil dari penerapan verifikasi dan validasi data sesuai dengan yang diharapkan. masing-masing personil baik dari perangkat desa/kelurahan maupun kecamatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenang yang diberikan dalam penerapan verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19*. Walaupun masih terdapat oknum yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan individu dan kelompoknya. Sehingga dalam indikator legitimasi dilihat dari pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan dikarenakan masih terdapat penyelewengan wewenang dalam penerapan verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* di Kecamatan Wlingi.

#### **- Fasilitas**

Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait sarana dan prasarana dalam penerapan mekanisme verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* sudah cukup memenuhi sesuai dengan kebutuhan. Baik itu fasilitas yang disediakan oleh Kecamatan Wlingi maupun Desa/Kelurahan di Kecamatan Wlingi. Namun seperti yang telah disebutkan dalam wawancara informan dalam indikator personil

bahwa operator desa/kelurahan merasa kurang dalam memperoleh materi terkait teknis dalam penerapan verifikasi dan validasi data. Kurangnya bimbingan teknis ini juga merupakan kekurangan dalam fasilitas yang seharusnya telah disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kapasitas personil yang ada.

Penerapan verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* menurut dimensi sumberdaya dilihat dari empat indikator diatas bahwa masih terdapat kurangnya kapasitas sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan penerapan kebijakan.

### **3.2 Komunikasi**

Komunikasi merupakan syarat keberhasilan suatu penerapan kebijakan. Terdapat indikator untuk mengukur keberhasilan komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsisten. Penerapan verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* di Kecamatan Wlingi dikaitkan dengan teori yang digunakan peneliti mengenai dimensi komunikasi belum terlaksana dengan baik. Masih terdapat *miss communication* dimana operator desa/kelurahan sudah melakukan verifikasi dan validasi data yang sudah diusulkan, namun masih terdapat data eror dikarenakan data yang telah di *input* operator lapangan tidak *sinkron* dengan data dari Dukcapil maupun Kominfo, sehingga proses *update* data terhambat.

### **3.3 Disposisi**

#### **- Seleksi Personil**

Pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang berdedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. peneliti tidak menemukan adanya sikap pelaksana kebijakan yang bertindak sesuai kemauan sendiri khususnya di Kecamatan Wlingi. Tidak terdapat penyalahgunaan jabatan sebagaimana yang telah simpang siur di tengah masyarakat. Disposisi pelaksana kebijakan di Kecamatan Wlingi sudah melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan. Namun dikarenakan *miss communication* yang telah peneliti sebutkan sebelumnya dalam indikator komunikasi diatas menyebabkan masyarakat memiliki paradigma tersendiri yang menganggap perangkat kecamatan maupun desa/kelurahan tidak memiliki integritas personil yang baik.

#### **- Insentif**

Faktor ini dapat memanipulasi kinerja dari pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu sebagai faktor pendorong para pelaksana kebijakan menjalankan tupoksinya secara total, royal dan loyal. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau organisasi.

Dalam proses penerapan mekanisme verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* di Kecamatan Wlingi mengenai intensif dijelaskan oleh informan peneliti yaitu bahwa masing-masing pelaksana kebijakan khususnya operator desa/kelurahan sudah mendapatkan intensif yang cukup sesuai dengan anggaran desa/kelurahan masing-masing, bahkan bagi perangkat RT juga memiliki biaya operasional sendiri yang sudah ditetapkan dalam anggaran desa/kelurahan masing-masing.

Pihak pelaksana kebijakan menunjukkan karakteristik dan sikap pelaksana sudah direalisasikan dengan baik serta intensif yang cukup pada saat penerapan mekanisme verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* di Kecamatan Wlingi.

### 3.4 Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. *Standard Operational Procedure* (SOP) adalah perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumberdaya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang luas.

Berkaitan dengan mekanisme juga disampaikan oleh informan lainnya bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan yaitu verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* dimulai dari tingkat desa/kelurahan, dimana data warga disesuaikan dengan keadaan sebenarnya di lapangan sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial *Covid-19*, kemudian dilaporkan secara bertahap hingga ke pusat untuk diproses terkait penyaluran bantuan sosial *Covid-19* tersebut. Namun dalam prosesnya belum sesuai dengan yang diharapkan, karena hasil verifikasi dan validasi data belum sesuai dengan keadaan di lapangan.

Banyaknya perbaikan DTKS yang telah di *input* oleh Kecamatan Wlingi sepanjang 2021 sejumlah 11.085 KPM. Dimana jumlah DTKS disetiap desa/kelurahan sejumlah 6.080 KPM, sedangkan total penerima bansos secara keseluruhan sebanyak 11.677 KPM. Sehingga perangkat kecamatan melakukan *update* perbaikan data dimana sebanyak 2.958 KPM, kemudian hasil export ini adalah verifikasi dan validasi data yang di *input* dalam aplikasi SIKS-NG oleh operator desa/kelurahan sejumlah 8.127 KPM. Jadi total dari hasil perbaikan dan *export* data sejumlah 11.085 KPM. Melihat data tersebut di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksana kebijakan di Kecamatan Wlingi telah menerapkan kebijakan terkait verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang ditetapkan. Walaupun masih terdapat kendala dalam data ganda dan lain-lain seperti yang telah peneliti jabarkan sebelumnya.

Penerapan mekanisme verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* di Kecamatan Wlingi untuk melaksanakan suatu kebijakan tersebut para pelaksana kebijakan harus mengerti proses kebijakan terkait atau *Standard Operasional Procedure* (SOP) agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan kebijakan, begitu juga pentingnya hubungan antar struktur birokrasi yang ada agar kebijakan dapat berjalan dengan baik.

### 3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan verifikasi dan validasi data dalam distribusi bantuan sosial bagi masyarakat sangatlah penting agar bantuan sosial yang diberikan dapat di distribusikan dengan tepat dan sesuai dengan keadaan lapangan. Penulis menemukan temuan penting yakni masih banyak permasalahan terkait data ganda yang menyebabkan data tidak akurat dan pendistribusian kurang maksimal. Sama halnya dengan temuan Maulana bahwa penerapan verifikasi dan validasi data masih belum berjalan maksimal dan belum cukup berhasil dikarenakan sumberdaya yang masih kurang. (Maulana, 2020).

Tentunya dalam penerapan verifikasi dan validasi data distribusi bantuan sosial masih terdapat beberapa kendala, hal ini sama dengan temuan pada penelitian Ekasari (Ekasari, 2021). Dari kendala-kendala yang ada tersebut dapat berdampak pada pendistribusian bantuan sosial yang ada yaitu banyak bantuan sosial yang tidak tersalurkan kepada masyarakat yang memang layak untuk mendapatkan bantuan tersebut (Gumabo, 2020). Banyak masyarakat mampu yang malah mendapatkan bantuan sosial padahal, masih banyak masyarakat yang kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan sosial tersebut. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat akibat dari tidak meratanya pendistribusian bantuan sosial seperti yang ditemukan oleh Fatkhul Khoiriyah dkk (2020). SOP sangat penting bagi pendistribusian bantuan sosial, agar bantuan tersebut dapat diberikan sesuai dengan sasaran dan masyarakat terlayani dengan baik. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian

Maun dimana pendistribusian Bantuan Langsung Tunai di Desa Talaitad sudah berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku (Maun, 2020).

### **3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penerapan verifikasi dan validasi data distribusi bantuan sosial di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar ini yakni masih minimnya pelatihan maupun bimbingan teknis bagi peningkatan kapasitas operator desa/kelurahan terkait penerapan verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* di Kecamatan Wlingi, kurangnya jumlah personil khususnya bagi operator desa/kelurahan dimana tidak sebanding dengan beban kerja yang diberikan dalam melakukan verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* di Kecamatan Wlingi, masih adanya *miss communication* antara unit kerja terkait.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa dalam penerapan mekanisme verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar masih belum berjalan maksimal. Hal ini dilihat dari beberapa faktor, diantaranya yang paling menonjol dan dominan yaitu kurangnya sumberdaya manusia. Selain itu kurangnya integrasi dari pelaksana kebijakan terkait, mengakibatkan data yang diverifikasi dan divalidasi berulang dan kurang valid. Terlepas dari hal itu sikap dan karakteristik perangkat kecamatan maupun desa/kelurahan cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Wlingi. Guna meningkatkan penerapan mekanisme verifikasi dan validasi data bantuan sosial *Covid-19* di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, disarankan perlu adanya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan komunikasi antar *stakeholder* sehingga pelaksanaan verifikasi dan validasi data berjalan secara maksimal.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan di Kecamatan Wlingi sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Edward III.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penerapan mekanisme verifikasi dan validasi data distribusi bantuan sosial di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Darajat, A. Hakim., dan Septa Ekasari. 2021. *Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar)*. Jurnal Translitera, 10 (1).
- Gumabo, Alekxander. 2021. *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Verifikasi dan Pemutakhiran Data (Studi di Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro)*. Jurnal Politico, 10 (4).
- Khoiriyah, Fatkhul., dkk. 2020. *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro*.



Jurnal Spirit Publik, 15 (2).

Maulana, Akbar. 2019. *Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Jember.

Maun, E.F. Carly. 2020. *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Politico, 9 (2).

Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban, Serta Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019*

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

